

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

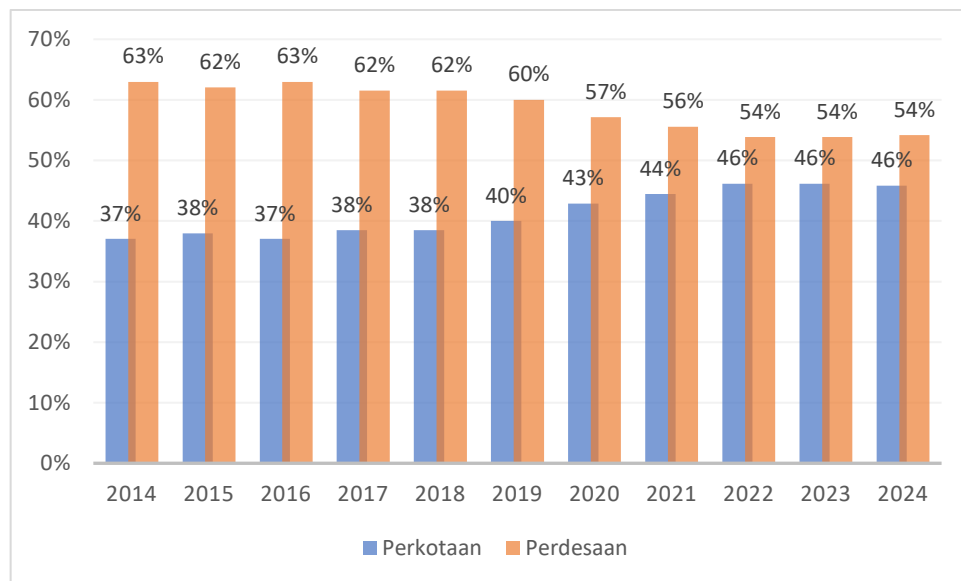
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh setiap negara dalam meningkatkan taraf hidup sekaligus menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara membawa pengaruh positif maupun negatif (Ladjin *et al.* 2022). Suatu negara dapat dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonominya apabila telah mampu mengatasi tiga masalah yang tidak dapat dipisahkan oleh pembangunan ekonomi. Adapun ketiga permasalahan tersebut yakni ; (1) meningkatnya jumlah penduduk miskin (2) distribusi pendapatan yang semakin timpang dan (3) lapangan pekerjaan yang minim variasi sehingga tidak mampu menyerap besarnya jumlah pencari kerja (Arandi, 2025).

Ladjin *et al.*, (2022) Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pencapaian tingginya angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi keberhasilan negara dalam mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai satu kondisi baik secara absolut maupun relatif yang menyebabkan individu atau kelompok masyarakat yang ada pada suatu wilayah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku dalam kehidupan masyarakat karena sebab natural, kultural maupun struktural (Susanti, 2014). Kemiskinan merupakan salah satu hambatan dalam pembangunan ekonomi di seluruh negara, baik maju maupun negara berkembang. Wulansari *et al.*, (2024) Kemiskinan menunjukkan kondisi dimana ketidakmampuan individu maupun kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya guna mencapai hidup yang layak.

Wulandari *et al.*, (2022) menunjukkan kemiskinan merupakan permasalahan global yang sampai saat ini masih memerlukan perhatian utama berbagai negara. Menurut Worldbank, pada tahun 2022 masih terdapat ratusan juta jiwa di dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem dengan pengeluaran kurang dari US\$2,15 per hari. Sebagian negara telah menunjukkan kemajuan dalam menekan angka kemiskinan seperti pada kawasan Asia Timur, tetapi di wilayah Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi. Melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam agenda global *Sustainable Development Goals (SDGs)* menempatkan pengentasan kemiskinan dalam segala bentuk sebagai tujuan utama yang harus dicapai pada tahun 2030 Ferezagia (2018). Adanya tantangan dinamika global seperti pandemi COVID-19 dan perubahan iklim telah memperlambat laju penurunan kemiskinan dunia (Pid, 2020).

Dao, (2004) dalam penelitiannya menunjukkan fenomena kemiskinan juga dialami oleh negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Gasparini (2015) menyatakan bahwa sebagian besar penduduk dunia, sekitar 85 persen, hidup di negara-negara berkembang yang masih menghadapi berbagai permasalahan pembangunan, termasuk tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi saja belum mampu menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar juga masih menghadapi tantangan dalam mengurangi kemiskinan, terutama karena masih terdapat kesenjangan pembangunan antarwilayah serta perbedaan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi. Arifin (2020) Persoalan kemiskinan bukan dilihat berdasarkan presentase dan jumlah penduduk miskin tetapi yang perlu

diperhatikan juga adalah tingkat keparahan dan kedalaman dari kemiskinan. Keparahan mengukur seberapa besar perbedaan antara keluarga miskin dengan yang lebih kaya dalam hal kualitas hidup dan akses terhadap layanan dasar sementara kedalaman kemiskinan mengacu pada seberapa jauh pendapatan keluarga miskin berada di bawah garis kemiskinan (Ibrahim, 2025).

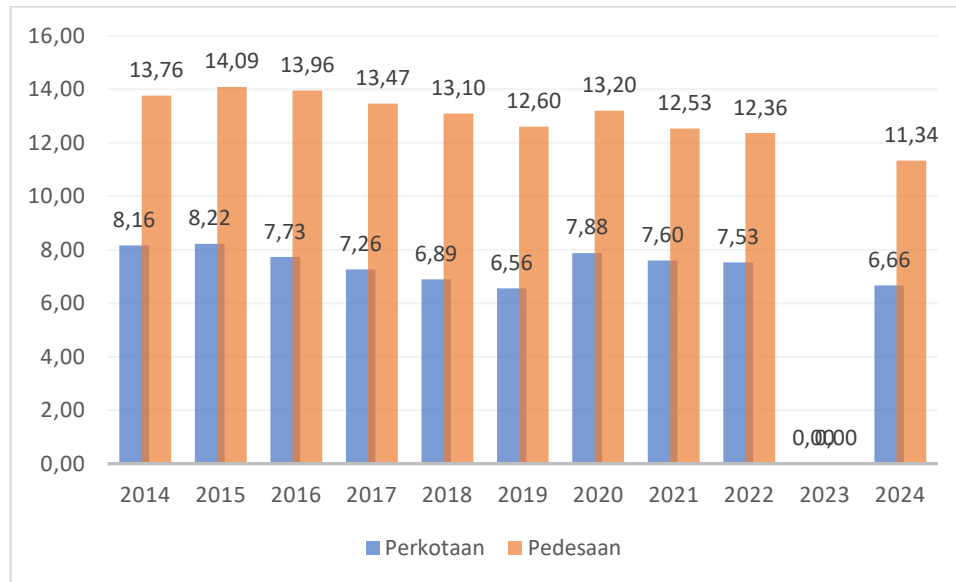


Sumber data : BPS (Data Diolah)

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah Juta Jiwa (Persen)

Berdasarkan jumlah penduduk miskin menurut wilayah juta jiwa, lebih dari 23 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan Indonesia, dimana lebih dari 50 persen dari mereka tinggal di daerah pedesaan. Kemiskinan pedesaan masih menjadi permasalahan utama pembangunan di negara berkembang. Fenomena kemiskinan di daerah pedesaan disebut kemiskinan pedesaan (Somantri, 2022). Kemiskinan di pedesaan umumnya disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap teknologi, lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini muncul akibat kurang optimalnya peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta adanya ketimpangan dan ketidakadilan sosial, khususnya

dalam aspek ekonomi (Istyawan, 2025). Mayoritas masyarakat pedesaan menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian (Arifin, 2020).



Sumber data : BPS (Data Diolah)

Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah (Persen)

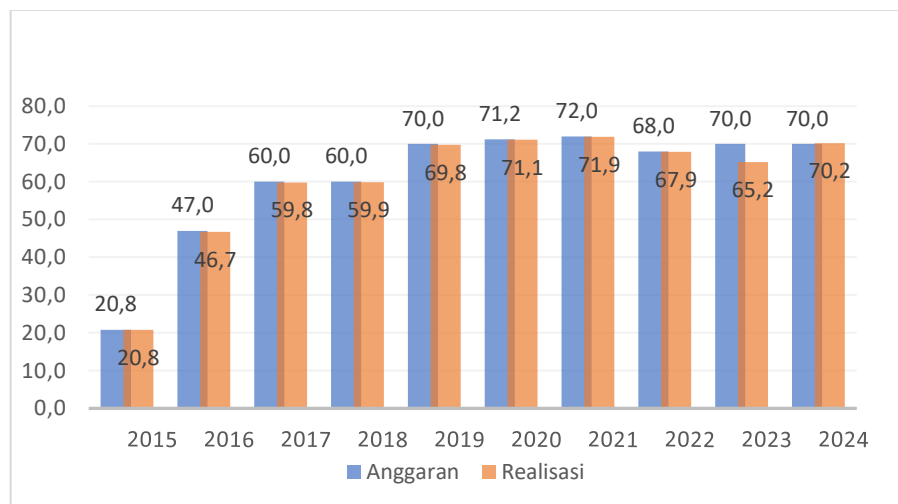
Berdasarkan jumlah penduduk miskin menurut provinsi dan daerah tersebut terjadi penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Penurunannya juga semakin melambat di antaranya masyarakat yang tinggal di pedesaan. Hal tersebut menunjukkan desa sangat rentan terhadap guncangan ekonomi (Pid, 2020). Kemiskinan pedesaan masih terjadi karena aksesnya terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan teknologi lalu isolasi geografis menjadi faktor yang memperburuk keadaan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa bukan hanya disebabkan keterbatasan ekonomi, tetapi juga pola pikir yang belum menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan penting. Ketimpangan fasilitas kesehatan membuat masyarakat sulit memperoleh layanan layak, sementara

keterbatasan sarana dan keterampilan teknologi menghambat produktivitas serta akses terhadap informasi dan peluang ekonomi (Istyawan, 2025). Kondisi kemiskinan bisa menurunkan kualitas sumber daya manusia karena terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi yang berdampak pada melemahnya produktivitas (Agus Triono & Sangaji, 2023).

Isnowati *et al.*, (2023) menunjukkan peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan pedesaan Indonesia sangat diperlukan, mengingat bahwa kemiskinan adalah masalah multidimensi. Upaya untuk mengatasinya memerlukan berbagai langkah dan melibatkan semua pihak. Salah satunya dengan melalui fiskal desentralisasi (Isnowati *et al.*, 2023). Pemerintah berperan dalam modal pembentukan melalui belanja pemerintah di berbagai bidang sebagai tingkat desentralisasi akan mempengaruhi komposisi pengeluaran pemerintah Grisorio (2015) seperti pengeluaran pemerintah untuk fasilitas umum, infrastruktur yang dapat meningkatkan perekonomian pertumbuhan dan mengurangi jumlah kemiskinan.

Wulandari *et al.*, (2025) di dalam penelitiannya menunjukkan fiskal desentralisasi melalui kebijakan Dana Desa, yaitu transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang bertujuan memperkuat pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan pelayanan dasar, serta memberdayakan masyarakat desa guna mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Munnell (1992) menyatakan bahwa investasi modal publik dapat memperluas kapasitas produksi suatu daerah, baik dengan meningkatkan sumber daya maupun dengan meningkatkan produktivitas sumber daya yang ada. Wulansari *et al.*, (2024) Pemerintah meluncurkan program dana desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

yang mengatur tata kelola pemerintahan desa, otonomi desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nahwan, D., *et., al* (2023) Dana Desa mulai disalurkan pada tahun 2015 sebesar 20,7 triliun untuk sekitar 74.093 desa di seluruh Indonesia. Alokasi anggaran terus meningkat hingga lebih dari Rp70 triliun per tahun pada periode 2019-2023. Program ini memberikan keluasaan bagi desa untuk menyalurkan dana pada infrastruktur pedesaan, pembangunan modal manusia, dan penciptaan lapangan kerja (Rammohan & Tohari, 2023).



(Sumber: <https://dijpb.kemenkeu.go.id>, 2025)

Gambar 1. 3 Grafik Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2024 (Triliun)

Berdasarkan perkembangan dana desa tahun 2015-2024, setiap tahun anggaran dan realisasi mengalami peningkatan dari pertama kali dianggarkan, kemudian hingga tahun 2021 dana desa terus meningkat lebih dari 3,5 kali lipat dibandingkan tahun 2015 (Kementrian Keuangan, 2022). Penyaluran Dana Desa terbagi menjadi tiga komponen, yaitu dana desa reguler, dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) desa, dan dana desa untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan alokasi minimal 8 persen dari total pagu dana desa yang diprioritaskan untuk mendukung program percepatan pembangunan desa Permendesa, (2021). Kenaikan jumlah dana desa didorong oleh komitmen pemerintah terhadap

desentralisasi fiskal dan upaya mempercepat pembangunan infrastruktur serta pengentasan kemiskinan di pedesaan (Novi & Rizky, 2023).

Penelitian oleh Isti *et al.*, (2023) pada tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan terjadi perubahan tidak teratur seperti naik turun dalam alokasi dan realisasi Dana Desa akibat reorientasi kebijakan fiskal nasional selama pandemi COVID-19, ketika sebagian anggaran dialihkan untuk program pemulihan ekonomi nasional. Selain faktor kebijakan nasional, tata kelola keuangan desa yang belum optimal, seperti keterlambatan administrasi dan rendahnya akuntabilitas aparatur, turut mempengaruhi realisasi Dana Desa di berbagai daerah Dan *et al.*, (2024) di sisi lain, penerapan mekanisme berbasis kinerja (*performance-based transfer*) membuat besaran alokasi berbeda antar desa sesuai tingkat efektivitas pengelolaan (Halim & Taryani, 2023). Kenaikan Dana Desa dari 2015 hingga 2019 mencerminkan ekspansi fiskal dan komitmen pemerataan pembangunan Worldbank (2020), sedangkan perubahan tidak teratur pada 2020–2021 terjadi akibat penyesuaian fiskal nasional, kebijakan pandemi, dan peningkatan pengawasan tata kelola di tingkat desa (Darmi *et al.*, 2022).

Fahmi (2025) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peningkatan Dana Desa terbukti memberikan dorongan signifikan terhadap pembangunan ekonomi perdesaan, menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa memiliki korelasi positif dengan percepatan pembangunan ekonomi desa. Temuan tersebut diperkuat oleh Andina & Kim (2023) yang menjelaskan bahwa program Dana Desa memberikan efek pembangunan yang lebih besar di wilayah dengan infrastruktur dasar yang memadai, sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi lokal secara lebih cepat. Dana Desa juga berkontribusi terhadap penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan

yang menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi desa (Anam *et al.*, 2023).

Tidak hanya memperkuat pembangunan, Dana Desa memiliki peran signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Andina & Kim, (2023) bahwa Program Dana Desa secara nyata menurunkan kemiskinan nasional terutama empat tahun setelah implementasinya. Penelitian Anam *et al* (2023) juga menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan melalui infrastruktur desa berkontribusi langsung terhadap pengurangan kemiskinan rumah tangga. Penelitian di Provinsi Lampung oleh Zuliansyah & Wahyudi, (2024) menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan antara Dana Desa dan tingkat kemiskinan, yang berarti semakin besar alokasi Dana Desa, semakin rendah tingkat kemiskinan yang tercatat. Berbagai temuan tersebut menegaskan bahwa Dana Desa memberikan dampak konsisten terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Indonesia (Wahyudi *et al.*, 2022).

Rahmawati *et al.*, (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa penurunan realisasi pada tahun-tahun tertentu dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dan situasi pandemi yang memaksa realokasi anggaran. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ikhwanto *et al.*, (2020) adanya kebijakan refocussing dan realokasi yang diwajibkan pemerintah selama pandemi membuat desa harus mengalihkan sebagian besar anggaran pembangunan fisik ke pencegahan COVID-19 serta penyaluran bantuan langsung tunai desa. Penurunan realisasi sering kali dipicu oleh lambatnya penyaluran dana karena keterlambatan dokumen, komunikasi yang tidak efektif, kapasitas sumber daya manusia yang kurang memadai serta ada perubahan regulasi mendadak yang

membuat desa harus menyesuaikan kembali APBDes yang sedang berjalan (Suryanovi 2019). Kebijakan realokasi selama pandemi belum berjalan efektif dan sering tidak memadai sehingga kegiatan yang sudah direncanakan terpaksa dikurangi atau dibatalkan yang pada akhirnya menurunkan tingkat realisasi dana desa dari tahun ke tahun (Utami *et al.*, 2023). Penurunan realisasi penting untuk diperhatikan karena dalam mengurangi kemiskinan sangat ditentukan melalui sejauh mana anggaran dana desa dapat direalisasikan secara optimal (Agusta, 2024).

Diapati (2025) menyatakan bahwa perbedaan antara anggaran dan realisasi sering disebabkan oleh keterlambatan administrasi, rendahnya kapasitas aparatur desa, serta permasalahan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan desa. Menurut Rammohan *et al.*, (2023) pada penelitian mereka menunjukkan bahwasannya dana desa dapat menurunkan tingkat kemiskinan pedesaan sebesar 1,7 persen serta meningkatkan konsumsi rumah tangga, terutama rumah tangga pertanian, program itu juga mendorong partisipasi tenaga kerja perempuan di sektor non-pertanian yang menandakan adanya diversifikasi ekonomi pedesaan, tetapi penelitian tersebut juga menyoroti adanya variasi dampak antar wilayah, yang menandakan efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi setempat. Zahro, (2023) Dana Desa tidak bisa berdiri sendiri, meskipun Dana Desa membantu pembangunan infrastruktur dasar, efeknya terhadap penguatan ekonomi lokal masih terbatas jika tidak didukung oleh lembaga desa yang produktif seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dana Desa baru benar-benar efektif dalam mengurangi kemiskinan bila dikombinasikan dengan pengembangan ekonomi produktif di desa (Wulansari *et al.*, 2024).

Studi pada Ghassani *et al.*, (2022) menunjukkan implementasi Dana Desa juga menghadapi sejumlah kritik, bahwasannya kapasitas kelembagaan desa masih menjadi hambatan utama. Banyak desa yang cenderung mengalokasikan Dana Desa lebih besar pada proyek fisik jangka pendek seperti jalan dan bangunan, dibandingkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat atau peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini mengakibatkan menurunnya kemiskinan yang bersifat kurang berkelanjutan (Fisabililah *et al.*, 2020).

Anam *et al.*, (2023) menunjukkan bahwasannya Dana Desa terbukti memberikan kontribusi positif terhadap penurunan kemiskinan. Efektivitasnya sangat bergantung pada arah penggunaan anggaran dan dukungan faktor lain seperti infrastruktur, fasilitas sosial, serta dinamika ekonomi lokal Hilmawan *et al.*, (2023). Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana Dana Desa bersama dengan faktor-faktor pendukung lainnya benar-benar mampu mengurangi kemiskinan pedesaan di Indonesia, kemudian dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan pedesaan belum merata Saragi (2021). Desa dengan infrastruktur baik, fasilitas sosial memadai, dan ekonomi lokal yang aktif (BUMDes, UMKM, pasar desa) cenderung mengalami penurunan kemiskinan lebih cepat dibandingkan desa dengan kapasitas kelembagaan lemah (Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2018).

Fasilitas sosial desa dapat dipahami sebagai berbagai bentuk pelayanan dasar dan infrastruktur publik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat desa, seperti sarana pendidikan, kesehatan, pasar desa, jalan desa, jembatan, serta pusat layanan sosial yang menopang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan warga sebagaimana dijelaskan bahwa pembangunan desa menekankan pemenuhan infrastruktur dan layanan publik sebagai aspek kunci kemajuan pedesaan

(Hilmawan *et al.*, 2023). Penyediaan fasilitas sosial ini berperan penting karena kemiskinan pedesaan umumnya disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang rendah akibat minimnya pelayanan sosial dasar di desa terbatas (Istyawan, 2025). Peningkatan fasilitas sosial melalui dana desa menjadi strategi nasional karena kebijakan dana desa ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada penyediaan infrastruktur publik serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (Novi & Rizky, 2023). Apabila dalam konteks pembangunan desa, infrastruktur seperti jalan desa, pasar desa, dan sarana pelayanan publik terbukti menjadi prioritas penggunaan dana desa dan menjadi bagian dari indikator kemajuan pembangunan desa dalam *Village Development Index* atau IDM (Zahara *et al.*, 2024).

Fasilitas sosial desa juga terkait erat dengan pembangunan ekonomi lokal karena dana desa dirancang untuk memperkuat sumber-sumber ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan mobilitas warga desa (Wahyunie, 2024). Penelitian menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur desa melalui dana desa berkontribusi pada pembangunan pedesaan, meskipun dampaknya terhadap pengurangan angka kemiskinan membutuhkan porsi yang lebih besar pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan hanya pembangunan fisik semata (Wahyunie, 2024). diperkuat oleh temuan bahwa desa dengan infrastruktur dan layanan dasar yang lebih baik cenderung mengalami peningkatan status pembangunan desa yang berhubungan dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal (Bastian Ahmadan *et al.*, 2025).

Studi pada Husain (2020) menegaskan bahwa fasilitas sosial seperti pendidikan dan kesehatan memiliki dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan pedesaan, dengan indeks pembangunan desa sebagai variabel moderator. Fasilitas sosial desa berperan strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti sekolah dasar hingga menengah yang mudah dijangkau akan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak desa, sehingga kualitas sumber daya manusia meningkat. Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), posyandu, dan klinik desa menjadi penopang utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta memperpanjang harapan hidup (Wenang *et al.*, 2021). Sarana olahraga memberikan ruang bagi pengembangan fisik dan mental generasi muda, sementara tempat ibadah berfungsi memperkuat ikatan spiritual, moral, dan kondisi sosial masyarakat pedesaan (Solikin, 2016). Fasilitas sosial yang mampu menciptakan masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan memiliki solidaritas tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas tenaga kerja sekaligus memperkuat modal sosial desa (Hanif *et al.*, 2020).

Naufal *et al.*, (2023) fasilitas sosial juga berperan sebagai jalur penting dalam pengentasan kemiskinan pedesaan, melalui peningkatan kualitas jumlah pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial masyarakat, fasilitas sosial memperkuat modal manusia dan sosial yang menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi jangka panjang. Nugroho (2015) menunjukkan bahwa fasilitas sosial desa berupa sekolah dan layanan kesehatan menurunkan kemiskinan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Laksono *et al.*, (2023) menemukan bahwa ketimpangan akses rumah sakit dan layanan kesehatan antarwilayah di Indonesia

menyebabkan kesenjangan kesejahteraan, sehingga perbaikan fasilitas sosial di desa dapat menjadi strategi penting untuk mengurangi kerentanan masyarakat miskin.

Ketersediaan fasilitas pendidikan di desa mampu meningkatkan akses dasar masyarakat terhadap pengetahuan sehingga memperluas wawasan, meningkatkan literasi, dan memperbaiki kemampuan pengambilan keputusan ekonomi (Cremin & Goretti, 2012). Ketika akses pendidikan semakin merata, penduduk desa memiliki kemampuan lebih baik dalam memasuki pasar kerja, memperoleh pendapatan lebih tinggi, dan menghindari jebakan kemiskinan sebagaimana ditunjukkan oleh bukti empiris bahwa akses pendidikan dasar merupakan faktor paling berpengaruh dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia (Haidir *et al* 2023). Pendidikan juga terbukti meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjaga kesehatan, berwirausaha, mengambil keputusan rumah tangga yang lebih produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keseluruhan (Gounder & Xing, 2015).

Menurut Guerra & Roope (2024) adanya posyandu, poskesdes, dan layanan kesehatan dasar lainnya menurunkan risiko keluarga jatuh miskin akibat biaya kesehatan dan hilangnya pendapatan karena sakit, karena layanan kesehatan yang mudah dijangkau mempercepat pemulihan dan menjaga produktivitas kerja masyarakat. Akses layanan kesehatan esensial yang lebih baik terbukti secara statistik menurunkan tingkat kemiskinan karena cakupan layanan seperti imunisasi, layanan persalinan, dan perawatan penyakit dasar mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin (Bettenhausen *et al.*, 2021)

Fasilitas sosial seperti masjid, balai desa, aula pertemuan, dan ruang publik menciptakan ruang berkumpul yang memperkuat modal sosial desa, yaitu kepercayaan, jaringan, kerja sama, dan norma kolektivitas yang berperan besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Narayan, 1999). Modal sosial semacam ini terbukti meningkatkan koordinasi masyarakat, memperkuat solidaritas, mendorong partisipasi dalam program pembangunan, dan menumbuhkan gotong royong untuk mengelola aset ekonomi desa, yang turut mempercepat pengentasan kemiskinan (Aritenang, 2021). Fasilitas sosial di Indonesia yang baik juga memungkinkan desa mengoptimalkan program seperti BUMDes, PADes serta pemberdayaan masyarakat, karena jejaring sosial yang kuat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ekonomi desa (Hilmawan *et al.*, 2023)

Ekonomi lokal dapat dipahami sebagai proses pengembangan ekonomi yang bertumpu pada potensi, partisipasi, dan kegiatan produktif masyarakat lokal (Wulandari *et al.*, 2020). Penguatan ekonomi lokal juga identik dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal, inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat telah berhasil mengurangi kemiskinan dan masalah sosial dalam mengintegrasikan lembaga-lembaga lokal (Suyatna *et al.*, 2024). Apabila dalam konteks pembangunan pedesaan, penguatan ekonomi lokal terbukti mampu menurunkan tingkat kemiskinan karena daerah dengan *village development index* yang dikategorikan sebagai desa mandiri dan maju memiliki potensi untuk mengurangi kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan (Handoyo & Hidayatina, 2021). Pengembangan sektor ekonomi lokal melalui pariwisata pedesaan dapat mendorong kesejahteraan karena pariwisata membantu mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan

masyarakat antara masyarakat pedesaan dan perkotaan (D. Wulandari et al., 2020).

Purwanta *et al.*, (2025) perekonomian lokal desa juga merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan karena memiliki peran penting dalam pembangunan pedesaan. Optimalisasi pemanfaatan potensi desa menjadi sangat diperlukan untuk mendukung hal ini. Perekonomian desa yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berfungsi sebagai pilar utama pembangunan, sebab keberadaannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat (Diatmika, 2021). Pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi lokal dapat memperkuat kemandirian ekonomi dan mengurangi kemiskinan dengan mendorong partisipasi masyarakat, mengembangkan sektor produktif, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan (Novita *et al.*, 2023). Sebagian besar masyarakat desa Indonesia masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian, baik sebagai petani pemilik lahan, buruh tani, maupun penggarap. Sektor ini sering menghadapi kendala klasik, seperti keterbatasan permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya teknologi, serta lemahnya akses pasar. Kendala tersebut mengakibatkan hasil pertanian kerap dijual hanya dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Melakukan diversifikasi usaha dan penguatan basis ekonomi lokal sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Adesoye *et al.*, 2018).

Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, pasar desa, dan UMKM terbukti memperkuat kapasitas desa dalam menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hilmawan *et al.*, (2023) menyatakan

bahwa selain Dana Desa, penguatan BUMDes dan pendapatan asli desa (PADes) menjadi faktor penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Desa, yang berdampak pada menurunnya kemiskinan. Penelitian lain juga menekankan pentingnya inovasi manajemen BUMDes dan kapasitas kelembagaan desa dalam memperkuat ekonomi lokal (Purwanto *et al.*, 2025).

Jayadi (2016) melalui ekonomi lokal desa terhadap pengentasan kemiskinan pedesaan dapat dipahami sebagai proses bagaimana kegiatan ekonomi di tingkat desa mampu menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Rezza *et al.*, (2025) penguatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu menyalurkan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat dengan cara menciptakan lapangan kerja, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kemampuan warga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga pengelolaan BUMDes yang baik dapat menjadi sarana penting dalam mengurangi kemiskinan di desa. Pembangunan desa yang ditunjukkan melalui *Village Development Index (VDI)* berperan besar dalam mengurangi tingkat dan keparahan kemiskinan. Desa yang tergolong maju dan mandiri memiliki kemampuan lebih tinggi untuk menyalurkan pertumbuhan ekonomi lokal menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya (Handoyo & Hidayatina, 2021). Pertumbuhan ekonomi hanya akan efektif dalam menurunkan kemiskinan apabila disertai dengan pemerataan pendapatan, sebab ketimpangan yang tinggi dapat menghambat penyaluran hasil pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat miskin di pedesaan (Kwasi, 2017).

Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga karena usaha mikro dan kecil menyerap tenaga kerja lokal yang sebelumnya mengandalkan sektor subsisten (Beck & Demirci-kunt, 2007). Akses pembiayaan, pelatihan manajerial, dan dukungan pemasaran memungkinkan UMKM meningkatkan produktivitas dan margin keuntungan sehingga dampak pertumbuhan menjadi inklusif bagi kelompok (Beck *et al.*, 2003). Bukti spasial di Indonesia menunjukkan konsentrasi UMKM yang lebih tinggi berkorelasi dengan penurunan pengangguran lokal dan perbaikan indikator kemiskinan regional (Widita *et al.*, 2024). Intervensi yang menargetkan UMKM perempuan dan kelompok rentan dapat memperkuat transmisi pendapatan ke rumah tangga karena peningkatan kapasitas manajerial dan akses pasar meningkatkan pendapatan keluarga (Ratnaningtyas & Wicaksono 2025). Kajian kebijakan Indonesia juga menegaskan bahwa program pemberdayaan UMKM (modal, pelatihan, inkubasi) adalah jalur praktis menurunkan kemiskinan lokal bila dibarengi akses pasar dan infrastruktur (Tambunan, 2011).

Menurut penelitian oleh minanirwati *et al* (2021) perbaikan fungsi pasar desa membantu petani dan pelaku UMKM menurunkan biaya pemasaran sehingga mereka dapat menjual produk dengan lebih mudah, mendapatkan keuntungan lebih besar, dan menjadi kurang rentan terhadap kemiskinan. Sejalan dengan itu, Syukria (2023) menjelaskan bahwa perbaikan fasilitas pasar membuat kegiatan jual beli menjadi lebih lancar sehingga pendapatan pedagang meningkat dan membuka kesempatan kerja bagi keluarga berpenghasilan rendah. Pasar desa semakin terasa keuntungannya ketika petani dan UMKM mendapat akses penjualan yang lebih luas melalui pasar yang dikelola dengan baik dan didukung

teknologi sederhana, sebagaimana dijelaskan bahwa pendapatan rumah tangga dapat naik hingga 20 sampai 40 persen dan ikut menurunkan tingkat kemiskinan. Keberadaan pasar desa yang dikelola secara profesional oleh BUMDes menunjukkan bahwa ekonomi lokal dapat menjadi cara efektif dalam pengentasan kemiskinan ketika pengelolaan pasar mampu meningkatkan pendapatan, menyediakan lapangan kerja, dan memperkuat partisipasi ekonomi masyarakat desa (Tahada et al., 2025).

Dana Desa telah menjadi instrumen utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan, terdapat ketidaksesuaian dalam temuan-temuan sebelumnya mengenai efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian oleh Muhammad Dafnis *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh positif terhadap modal sosial, yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas ekonomi dan layanan lokal. Sementara itu penelitian Wulansari *et al.*, (2024) dan Rammohan *et al.*, (2023) menunjukkan dampak positif Dana Desa terhadap menurunnya kemiskinan, tetapi ada variasi dampak antar wilayah yang menunjukkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi lokal mempengaruhi efektivitas program tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang merlukan perhatian lebih lanjut terhadap faktor-faktor lokal seperti modal sosial, kapasitas kelembagaan desa, serta pengelolaan dana desa.

Pengaruh infrastruktur desa terhadap kemiskinan pedesaan juga menjadi topik yang memerlukan penelitian lebih mendalam. Studi oleh Smas *et al.*, (2025) mengemukakan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih berperan penting dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di desa-desa, tetapi

implementasinya yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia mengindikasikan adanya kesenjangan antara wilayah desa yang satu dengan lainnya dalam pemanfaatan infrastruktur ini. Penelitian yang lebih spesifik terkait akses terhadap fasilitas sosial dan pembangunan ekonomi lokal juga diperlukan untuk menilai sejauh mana peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan dipengaruhi oleh faktor-faktor ini.

Penelitian sebelumnya sering kali mengkaji aspek-aspek terpisah seperti pengaruh ekonomi kreatif Insana *et al.*, (2022) atau peran sektor pertanian Purwanto *et al.*, (2025), tetapi tidak banyak yang mengintegrasikan variabel tersebut ke dalam kerangka yang lebih komprehensif yang melibatkan Dana Desa, fasilitas sosial, dan ekonomi lokal. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami sinergis interaksi antara Dana Desa, pembangunan infrastruktur desa, dan penguatan ekonomi lokal dalam mengatasi kemiskinan pedesaan. Hal ini sangat relevan mengingat ketimpangan kemiskinan antara daerah pedesaan dan perkotaan masih tinggi, meskipun alokasi anggaran untuk Dana Desa meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, kesenjangan penelitian yang ada menunjukkan bahwa diperlukan penelitian yang lebih mendalam tentang keterkaitan faktor-faktor pembangunan (Dana Desa, fasilitas sosial, dan ekonomi lokal) dalam mengurangi kemiskinan pedesaan. Terutama dalam konteks pengelolaan Dana Desa yang masih menghadapi tantangan terkait distribusi dan penggunaan yang tidak efisien di beberapa daerah. Penelitian ini sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan menguji pengaruhnya secara simultan terhadap kemiskinan pedesaan, dengan tujuan memberikan gambaran

yang lebih lengkap tentang keberhasilan dan hambatan dalam kebijakan pembangunan desa di Indonesia. Maka dari itu penulis ingin meneliti Keterkaitan antara Dana Desa, fasilitas sosial, dan ekonomi lokal sangat erat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana kebijakan pembangunan desa telah berhasil menekan angka kemiskinan sekaligus memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan pembangunan pedesaan di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan pedesaan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh fasilitas sosial desa terhadap tingkat kemiskinan pedesaan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh ekonomi lokal terhadap tingkat kemiskinan pedesaan di pedesaan?
4. Bagaimana keterkaitan antara Dana Desa, fasilitas sosial, dan ekonomi lokal dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan pedesaan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap pengurangan kemiskinan pedesaan.

2. Menganalisis pengaruh fasilitas sosial desa terhadap tingkat kemiskinan pedesaan di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh ekonomi lokal terhadap tingkat kemiskinan pedesaan di Indonesia.
4. Menjelaskan keterkaitan keempat faktor tersebut secara simultan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan pedesaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur dalam bidang ilmu ekonomi pembangunan, kebijakan publik, serta studi pedesaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan kajian serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa dalam menyusun strategi pembangunan desa yang lebih efektif dan tepat sasaran pusat, terutama dalam penggunaan Dana Desa.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat desa mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan, sehingga manfaat Dana Desa, infrastruktur pembangunan, dan fasilitas sosial benar-benar dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.